

## INTISARI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang untuk menyediakan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal dan efisien. Pengguna data dan informasi pertanahan menuntut penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah penyedia layanan informasi pertanahan telah berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut, namun masih ditemui kendala terkait belum tuntasnya pemetaan bidang tanah. Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) diusulkan agar dapat menciptakan lebih banyak kesempatan untuk percepatan pemetaan bidang tanah dimana partisipan (BPN, aparat desa dan masyarakat) secara aktif terlibat dan memperoleh manfaat yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk pemanfaatan SIP berbasis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan bidang tanah dalam koridor aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) yang berlaku di BPN. Hasilnya diketahui bahwa pemetaan bidang berbasis partisipasi masyarakat merupakan metode pengumpulan data yang sesuai kebutuhan pengguna. Pemetaan partisipatif untuk membangun peta bidang tanah menyediakan informasi awal yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Permasalahan masih ditemui terkait konsistensi legal dan akurasi bentuk dan luas. Penggunaan aplikasi berbasis mobile yang digunakan bisa memenuhi kebutuhan dan menjanjikan efisiensi. Kendala ditemukan ketika otomatisasi entri data hasil pengumpulan data pertanahan secara prosedur masih belum diakomodasi dalam peraturan yang berlaku. Desain pemanfaatan SIP-P yang dihasilkan diharapkan bisa memberi panduan sekaligus sebagai pemicu disusunnya peraturan tentang otomatisasi entri data pertanahan dalam aplikasi KKP.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Pertanahan, pendekatan partisipatif, pemetaan bidang tanah, pendaftaran tanah

## ***ABSTRACT***

*The development of information and communication technology creates opportunities to provide a more reliable and efficient Land Information System (SIP). Users of land related data and information demand of good and reliable land information services. The National Land Agency (BPN) as a government agency that provides land information services has requested the approval, but it is still found that related parties have not completed the land mapping. The Participatory Land Information System (SIP-P) can be used to get more opportunities for accelerating participant field mapping (BPN, village officials and communities) that are actively involved and obtain the expected benefits. The objectives of this study were to use SIP-based community participation in field monitoring programs in the application of KKP application (Land Activities Computerization) that already exist at the BPN. Information that fit the need of the community. Participatory mapping to build maps of land parcels provides preliminary information to support land registration activities. Problems are still encountered related to legal consistency and accuracy of parcel form and area. The use of mobile-based applications that are used can meet needs and promise efficiency. Constraints found in the compilation of automation data entry results from related data collection are still not acquired in the applicable regulations. The design of the SIP-P assistance produced is expected to provide guidance as well as a trigger for the making of regulations regarding the automation of land data entry in the KKP application.*

**Keywords:** *Land Information System, participatory approach, land parcel mapping, land registration*